1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 2 4



Tanggal:

		3													16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

PAM Jaya Harus Percepat Pipanisasi

JAKARTA – Perumda PAM Jaya diminta mempercepat layanan air perpipaan seluruh wilayah Jakarta untuk pemerataan akses air bersih di masyarakat. "Kami mendesak pipanisasi dan jangkau air bersih ke rumah-rumah agar hak mendapatkan air bersih itu bisa diwujudkan," harap anggota Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike, Minggu.

Yuke menuturkan, hingga kini masih banyak masyarakat menggunakan air tanah yang selain tidak ramah lingkungan. Ini juga membuat turunnya permukaan tanah. Dia mengingatkan permukaan tanah Jakarta dalam beberapa periode terakhir turun 1-15 sentimeter per tahun. Bahkan di beberapa lokasi bisa 20-28 sentimeter per tahun.

"Banyak faktor yang membuat permukaan tanah terus menurun. Salah satu penyebab yang krusial adalah eksploitasi air tanah yang tidak bertanggung jawab," tambahnya. Disebutkan, salah satu daerah yang sempat mengalami krisis air adalah Jakarta Utara yang dekat dengan pesisir seperti Cilincing.

Para warga setempat banyak yang minta dibelikan mesin penyedot air tanah, meski berdampak buruk untuk lingkungan. Airnya pun sudah tercemar. "Warga tetap bersikeras memakainya karena air menjadi kebutuhan dasar rumah tangga. Padahal ke depan harus ketat penggunaan air tanah lakarta," jelasnya.

Selain itu, Yuke juga mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan penggunaan air tanah menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah.

Dengan demikian, diharapkan Perumda PAM Jaya dapat melakukan upaya. Salah satunya, pipanisasi 100 persen bisa lebih cepat dilakukan dari target 2030.

Pemprov lakarta bersama Perumda PAM menggencarkan sosialisasi peralihan penggunaan air tanah ke air perpipaan yang dipasok perusahaan tersebut. "Lebih kepada sosialisasi. Sudah berjalan sosialisasi. Kita mau mendorong mereka yang masih menggunakan air tanah untuk menggunakan air PAM Jaya," kata Direktur Pelayanan PAM Jaya, Syahrul Hasan.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu Pemerintah Provinsi Jakarta resmi melarang penggunaan air tanah di beberapa daerah yang telah memiliki sumber pasokan air bersih, selain air tanah mulai 1 Agustus 2023.
Upaya itu dilakukan dalam rangka meningkatkan pengendalian pengambilan air tanah.
Sebab pengambilan air tanah berdampak terjadinya keterbatasan kesediaan air tanah dan membuat penurunan permukaan tanah Jakarta.

Aturan larangan penggunaan air tanah tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah.

■ Ant/G-1